



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TAUKHID**
2. Jabatan : **KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA TIMUR**
3. NHK : **131380**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **5.231.900.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m²/36 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 505.050.000
2. Tanah Seluas 200 m² di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 290.250.000
3. Tanah Seluas 516 m² di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 827.500.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m²/22 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 477.100.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/100 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.005.500.000
6. Tanah Seluas 100 m² di KAB / KOTA CIREBON, WARISAN Rp. 477.500.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 528 m²/120 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.455.500.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m²/30 m² di KAB / KOTA KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 67.500.000
9. Tanah Seluas 124 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 126.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **268.055.000**

1. MOBIL, SUZUKI SPLASH MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 59.205.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI



Rp. 4.850.000

3. MOTOR, PIAGGIO SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI

Rp. 22.500.000

4. MOBIL, HONDA ODYSSEY Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.

169.000.000

5. MOTOR, VESPA SUPER Tahun 1974, HASIL SENDIRI Rp.

12.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 99.105.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 134.074.815

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 5.733.134.815

III. HUTANG

Rp. 2.402.571.087

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.330.563.728

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.